

**KEBIJAKAN KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH (KPID)
JAWA TENGAH DALAM MELAKUKAN PENGAWASAN TERHADAP
PENYELENGGARAAN LEMBAGA PENYIARAN**

TESIS

**Disusun Dalam Rangka Memenuhi Sebagian Persyaratan
Mencapai Derajat Magister**

Program Studi Magister Ilmu Hukum



**Oleh
LENSA SYLVIANI PRASETYO
2017-02-007**

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MURIA KUDUS
KUDUS
2019**

**KEBIJAKAN KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH (KPID)
JAWA TENGAH DALAM MELAKUKAN PENGAWASAN TERHADAP
PENYELENGGARAAN LEMBAGA PENYIARAN**

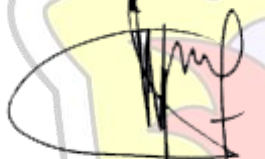
Disusun Oleh:

LENSA SYLVIANI PRASETYO
NIM. 2017-02-007

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
pada tanggal 2 Maret 2019

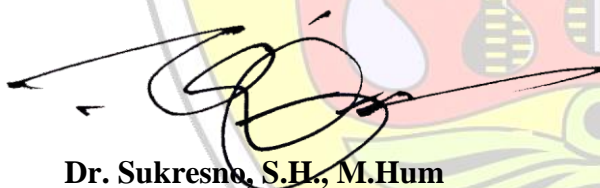
Susunan Dewan Penguji

Pembimbing Utama



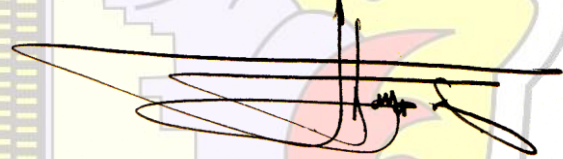
Dr. Suparno, S.H., M.S

Pembimbing Pendamping



Dr. Sukresno, S.H., M.Hum

Anggota Dewan Penguji I



Dr. Hidayatullah, S.H., M.Hum

Anggota Dewan Penguji II



Dr. Subarkah, SH., M.Hum

Tesis ini telah diterima sebagai persyaratan
Untuk memperoleh gelar Magister
Tanggal 2 Maret 2019




Dr. Hidayatullah, S.H., M.Hum)

Ketua Program Magister Ilmu Hukum

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Lensa Sylviani Prasetyo

NIM : 2017-02-007

Alamat : Desa Payang RT. 1 RW. 2 Kec. Pati Kabupaten Pati.

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Tesis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Dosen Pembimbing
2. Dalam Tesis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan sumber aslinya dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
3. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena tesis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Perguruan Tinggi ini.

Kudus, 4 Maret 2019
Yang membuat pernyataan

Lensa Sylviani Prasetyo

KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, karena berkat ridho dan limpahan rahmat serta karunia-Nya, akhirnya tesis yang berjudul Kebijakan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jawa Tengah dalam melakukan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan Lembaga Penyiaran dapat terselesaikan. Tesis ini sebagai persyaratan untuk meraih gelar Magister di bidang Ilmu Hukum pada Program Pascasarjana Universitas Muria Kudus.

Tesis ini berusaha menegaskan tentang Kebijakan KPID Jawa Tengah dalam melakukan pengawasan terhadap Lembaga Penyiaran. Penulis sadari, dalam penulisan banyak diberikan kemudahan oleh Allah SWT, begitupun dengan berbagai pihak yang sangat tulus hati dan terbuka membantu dalam proses penyelesaian penulisan tesis ini. Untuk itu dengan segala kerendahan hati dan rasa sangat hormat penulis sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas partisipasinya.

Pada kesempatan ini juga perkenankanlah penulis mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat :

1. Rektor Universitas Muria Kudus, Bapak Dr. Suparno, S.H., M.S dan sekaligus menjadi Dosen Pembimbing Utama, yang telah memberikan bimbingan, memberikan masukan, pengarahan dan motivasi kepada penulis
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus, Bapak Dr. Sukresno, S.H., M.Hum sekaligus menjadi Dosen Pembimbing Pendamping, yang juga tiada hentinya memberikan semangat untuk segera menyelesaikan tesis ini.
3. Ketua Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Muria Kudus, Bapak Dr. Hidayatullah, S.H, M.Hum sekaligus sebagai Anggota Dewan Penguji.
4. Bapak Subarkah, SH., M.Hum sebagai Anggota Dewan Penguji.

5. Segenap Bapak dan Ibu Dosen Pascasarjana beserta staf Program Magister Ilmu Hukum Universitas Muria Kudus yang telah membimbing, mengajarkan ilmunya dengan penuh kesabaran.
6. Koordinator Bidang Aduan dan Pengawasan, Ibu Dini Inayati, S.T yang memberikan ijin penelitian kepada penulis di KPID Jawa Tengah, terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk membantu penulis menyelesaikan tesis ini.
7. Kasi Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik Lokal Grobogan FM Kabupaten Grobogan Ibu Sri Hartiningsih, M.M.
8. Kasubbag Lembaga Penyiaran Publik Humas Setda Kabupaten Pati 87.6 FM Radio Suara Pati, Bapak Aris Sudiprasetyo, S.H yang sudah mengijinkan penulis untuk melanjutkan Studi Pascasarjana.
9. Terima Kasih kepada Semua Crew Lembaga Penyiaran Publik Lokal 87.6 Fm Radio Suara Pati (Radionya Orang Pati), (Bapak Setyo Budi Wibowo, SP, Mas Arief Endro/Bang Hendrajati, Mas Samsul Muarifin/Bang Yopi, Mas Aldi Garcia, Mas Teddy/Bung Andromeda, Mbak Adex Cahaya Surya, Mbak Sekar dan Dik Anggun C. Nisa.
10. Rekan-rekan angkatan 10 (Tahun Akademik 2017/2018) Program Magister Ilmu Hukum Universitas Muria Kudus, Bapak Ali Ahmadi, Bapak Ali Mufid, Bapak Syamsuri, Mas Sumarna, Mas Syaiful, Mas Fita, Mas Argo juga Mas Endri yang mempunyai solidaritas tinggi selama proses belajar mengajar, hingga menumbuhkan rasa kekeluargaan yang tiada terlupakan.
11. Pengelola administrasi dan perpustakaan Jurusan Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Muria Kudus, Mbak Uswatun dan Mbak Titandria.
12. Kedua Orang Tuaku tersayang Bapak Aris Sudiprasetyo, SH, terima kasih untuk do'a, dukungan, semangat, motivasinya pagi siang sore malam, tiada bosan untuk selalu mengingatkan penulis segera menyelesaikan tesis ini, juga untuk Mama Ida Andayani (Alm), terima kasih sudah melahirkanku ke dunia ini, kasih sayang Mama selalu ada didalam hati.

13. Budhe Retno Soediarti, terima kasih Budhe untuk supportnya.

Semoga kepada mereka semua, Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan rahmat dan hidayah serta pahala atas segala hal yang telah diberikan. Amin.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan tesis ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan sarannya sangat penulis terima dengan senang hati. Penulis juga memohon maaf atas segala kekhilafan, semoga Allah SWT selalu memberikan kemudahan, kesuksesan serta ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Amin



ABSTRACT

Policy

Central Java Regional Indonesian Broadcasting Commission (KPID) in Supervising the Implementation of Broadcasting Institutions

Television and Radio Broadcasting Institutions as electronic media are intended for all segments of society Television and Radio function as media for information, education and entertainment. The existence of pro-contra programs broadcast on television and radio often occurs in the community, and often the community follows what is seen and what is heard from the shows presented by the Broadcasting Institute.

This study discusses the Policy of the Regional Indonesian Broadcasting Commission (KPID) in Central Java in Supervising the Implementation of Broadcasting Institutions. The purpose of this research is to find out how the legal actions carried out by the Central Java KPID in dealing with Broadcasting Institutions are proven to violate the content of the broadcast / program content presented. The research method uses an empirical juridical approach.

Policy Research Results conducted by the Central Java KPID in supervising Broadcasting Institutions are guided by the Broadcasting Law, and the products of the Indonesian Broadcasting Commission (Central) namely the Indonesian Broadcasting Commission Regulation, in the form of Broadcasting Behavior Guidelines (P3) and Broadcast Program Standards (SPS)

The results of the analysis of the KPID Policy on Broadcasting Institutions that committed violations were based on the contents of the P3SPS. The most frequent violations are the rules regarding the advertisement that is not suitable for adult age Article 59 paragraph (3) SPS, and the playback of prohibited and restricted songs in Article 20 paragraph (1) and (2), as well as the display of testimony advertisements that cannot scientifically accountable (misleading). In the end, for those proven to have committed violations, KPID provided sanctions in the form of a written warning with procedures in accordance with regulations to realize healthy broadcasting.

Based on the above study it was concluded that the Central Java KPID needs to continue to monitor Broadcasting Institutions, so that the programs presented are useful for all groups.

Keywords: Policy, KPID, Central Java, Violations of Broadcasting Institutions.

INTISARI

Kebijakan

Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jawa Tengah Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan Lembaga Penyiaran

Lembaga Penyiaran Televisi dan Radio sebagai media elektronik adalah diperuntukkan bagi semua golongan masyarakat Televisi dan Radio berfungsi sebagai media informasi, pendidikan dan hiburan. Adanya pro kontra tayangan program yang disiarkan televisi maupun radio banyak terjadi di masyarakat, bahkan seringkali masyarakat mengikuti apa yang dilihat dan apa yang didengar dari tayangan yang disajikan oleh Lembaga Penyiaran tersebut.

Penelitian ini membahas tentang Kebijakan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jawa Tengah dalam melakukan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan Lembaga Penyiaran. Tujuan penelitian ini, yaitu ingin mengetahui bagaimana tindakan hukum yang dilakukan oleh KPID Jawa Tengah dalam menangani Lembaga Penyiaran yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap isi siaran/konten acara yang disajikan. Adapun metode penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris.

Hasil Penelitian Kebijakan yang dilakukan oleh KPID Jawa Tengah dalam melakukan pengawasan terhadap Lembaga Penyiaran berpedoman pada Undang-Undang Penyiaran, dan produk dari Komisi Penyiaran Indonesia (Pusat) yakni Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia, berupa Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) dan Standar Program Siaran (SPS).

Hasil analisa Kebijakan KPID terhadap Lembaga Penyiaran yang melakukan pelanggaran didasarkan pada isi P3SPS. Pelanggaran paling banyak dilakukan adalah aturan mengenai penayangan iklan yang tidak sesuai jam tayang usia dewasa Pasal 59 ayat (3) SPS, dan pemutaran lagu yang dilarang serta dibatasi pemutarannya Pasal 20 ayat (1) dan (2), serta penayangan iklan testimony yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah (menyesatkan). Pada akhirnya bagi yang terbukti melakukan pelanggaran, KPID memberikan sanksi berupa teguran tertulis dengan prosedur sesuai dengan regulasi untuk mewujudkan penyiaran yang sehat.

Berdasarkan kajian di atas disimpulkan bahwa KPID Jawa Tengah perlu terus melakukan pemantauan terhadap Lembaga Penyiaran, agar program acara yang disajikan, bermanfaat bagi semua kalangan.

Kata Kunci : Kebijakan, KPID, Jawa Tengah, Pelanggaran Lembaga Penyiaran.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRACT	vii
INTISARI	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Metode Penelitian.....	9
1. Pendekatan Masalah.....	9
2. Spesifikasi Penelitian	10
3. Jenis Data	10
4. Metode Pengumpulan Data.....	11
5. Metode Analisis Data.....	13
E. Sistematika Penulisan.....	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Kebijakan Lembaga	
1. Kebijakan	15
2. Pengertian Lembaga Penyiaran.....	16
3. Proses Perizinan Lembaga Penyiaran	19

B. Peran Lembaga Komisi Penyiaran Indonesia (KPI)	
1. Pengertian dan Dasar Pembentukan Lembaga Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID)	21
2. Kewenangan dan Tugas Pokok KPID dalam Pengawasan Lembaga Penyiaran.....	23
3. Hubungan KPID dengan Lembaga/Instansi Dalam Melakukan Pengawasan Lembaga Penyiaran.	29
 BAB III HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS	
A. Kebijakan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jawa Tengah Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan Lembaga Penyiaran	
1. Hasil Penelitian	32
2. Analisis.....	54
B. Tindakan Hukum Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jawa Tengah Terhadap Lembaga Penyiaran Yang Melanggar Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku.....	59
 BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	77
B. Saran.....	78
 DAFTAR PUSTAKA	80